

# Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional

## Indonesia's Strategies and Opportunities in BRICS Cooperation: Strengthening National Economic Security

Muslim<sup>1</sup>; Diah Ayu Permatasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIN, Indonesia

<sup>2</sup>Ubhara Jaya, Indonesia

Email: <sup>1</sup>mkimuslim@gmail.com, <sup>2</sup>pepy@ubharajaya.ac.id

### Article Info

Received: November 17, 2024

Revised: December 7, 2024

Accepted: December 8, 2024

**Abstract:** *This study analyzes Indonesia's strategies and opportunities in cooperation with BRICS to strengthen Indonesia's national economic security. Using a qualitative descriptive approach, the research evaluates the impact of economic policies, the launch of the BRICS currency, and infrastructure financing by the New Development Bank (NDB) on Indonesia's financial stability and competitiveness. The findings indicate that BRICS cooperation offers opportunities for trade diversification, access to strategic infrastructure funding, and strengthened collaboration in energy, technology, and industrial sectors. However, challenges such as rupiah exchange rate volatility and the risk of dependency on foreign investment require careful attention. This study contributes to providing strategic guidance for policymakers to leverage the opportunities offered by BRICS while mitigating emerging risks, thereby supporting national economic security. Additionally, it enriches academic literature on international cooperation and its implications for the economic stability of developing countries.*

**Keywords:** BRICS, Economic Policy, Economic Security, Indonesia, New Development Bank

**Abstrak:** *Penelitian ini menganalisis strategi dan peluang Indonesia dalam kerja sama dengan BRICS guna memperkuat keamanan ekonomi nasional*



Indonesia. Analisis deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi, peluncuran mata uang BRICS, dan pembiayaan infrastruktur oleh New Development Bank (NDB) terhadap stabilitas keuangan dan daya saing Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama BRICS menawarkan peluang diversifikasi perdagangan, akses pendanaan infrastruktur strategis, dan penguatan kolaborasi di sektor energi, teknologi, serta industri. Akan tetapi, tantangan seperti volatilitas nilai tukar rupiah dan risiko ketergantungan pada investasi asing memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan panduan strategis bagi pembuat kebijakan untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan BRICS sambil memitigasi risiko yang muncul, guna mendukung keamanan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik terkait kerja sama internasional dan implikasinya bagi stabilitas ekonomi negara berkembang.

**Kata Kunci:** BRICS, Indonesia, Keamanan Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, New Development Bank

## Pendahuluan

Keamanan ekonomi telah menjadi isu strategis yang semakin penting dalam studi ekonomi internasional, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam. Proses globalisasi telah memperluas hubungan ekonomi antarnegara, namun juga mengubah struktur dan paradigma keamanan ekonomi<sup>1</sup>. Konsep tradisional yang berfokus pada ketahanan domestik kini perlu diperluas untuk mencakup stabilitas keuangan internasional, risiko geopolitik, serta integrasi ekonomi global<sup>2</sup>. Dalam kerangka ini, kelompok negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) muncul sebagai pemain penting yang memberikan tantangan baru bagi dominasi ekonomi negara-negara maju. BRICS, dengan pertumbuhannya yang pesat dan upaya memperkuat pengaruhnya di pasar global, memengaruhi dinamika ekonomi internasional, termasuk bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Svitlana Shynkar et al., "Assessment of Economic Security of Enterprises: Theoretical and Methodological Aspects," *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 261-71, <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11573>.

<sup>2</sup> Magdalena Redo and Marta Gebeska, "Globalization in Growing Financial Markets as a Threat to the Financial Security of the Global Economy," *European Research Studies Journal* XXIII, no. Special Issue 1 (2020): 335-55, <https://doi.org/10.35808/ersj/1764>.

<sup>3</sup> Evgeny Sergeevich Streltsov et al., "The Economic Potential of the Brics Countries as a Challenge to Modern World Realities," *Propósitos y Representaciones* 9, no. SPE3 (2021), <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe3.1143>.

BRICS telah menjadi salah satu aktor utama dalam merancang ulang tatanan ekonomi global melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembentukan *New Development Bank* (NDB) dan diskusi mengenai penggunaan mata uang alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS<sup>4</sup>. Meskipun masih dalam tahap awal, inisiatif ini berpotensi besar dalam memengaruhi stabilitas keuangan global, termasuk negara-negara mitra dagang seperti Indonesia<sup>5</sup>. Sebagai salah satu mitra dagang utama BRICS, Indonesia mendapatkan peluang besar dalam meningkatkan ekspor dan investasi, namun juga terpapar pada tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan struktur keuangan global yang dipelopori oleh BRICS, seperti pergeseran nilai tukar rupiah dan ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri<sup>6</sup>.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan BRICS memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan strategis dengan BRICS tanpa terjebak dalam persaingan antara kekuatan besar<sup>7</sup>. Akan tetapi perbedaan kepentingan antar anggota BRICS serta tantangan internal seperti ketergantungan pada ekspor komoditas dapat menghambat efektivitas kerja sama dan memengaruhi Indonesia sebagai mitra dagang<sup>8</sup>. Oleh karena itu Indonesia perlu merumuskan strategi yang adaptif untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama ekonomi dengan BRICS sambil memitigasi potensi risiko yang muncul<sup>9</sup>.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika BRICS dalam konteks ekonomi global, namun belum banyak yang mengelaborasi

---

<sup>4</sup> Laura Trajber Waisbich and Caio Borges, "The BRICS' New Development Bank at the Crossroads: Challenges for Building Development Cooperation in the Twenty-First Century," in *Governing China in the 21st Century*, 2020, 149-87, [https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2\\_7](https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2_7).

<sup>5</sup> Casandra Aleksia and Arief Rizky Bakhtiar, "BRICS as New Alternatives in Reforming International Financial Institutions and Economic Partnerships," *Insignia: Journal of International Relations* 10, no. 2 (2023): 128, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2023.10.2.9135>.

<sup>6</sup> Marina Larionova and Andrey Shelepov, "BRICS, G20 and Global Economic Governance Reform," *International Political Science Review* 43, no. 4 (August 26, 2021): 512-30, <https://doi.org/10.1177/01925121211035122>.

<sup>7</sup> Penny Radjendra et al., "Indonesia's Vision As Global Maritime Fulcrum: A Geopolitical Strategy To Address Geopolitical Shifts In Indo-Pacific," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 5 (2022): 8621-34, <http://journalppw.com>.

<sup>8</sup> Bas Hooijmaaijers, "The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank," *International Political Science Review* 43, no. 4 (July 15, 2021): 481-94, <https://doi.org/10.1177/01925121211024159>.

<sup>9</sup> Chanif Ainun Naim and Fitriatul Hasanah, "Deconstructing the Empire: BRICS and the Rise of a Multipolar World," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 13, no. 1 (2024): 80, <https://doi.org/10.25077/ajis.13.1.80-90.2024>.

secara mendalam dampak strategisnya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia<sup>10</sup>. Kesenjangan penelitian ini terletak pada kurangnya analisis spesifik terkait implikasi kebijakan BRICS terhadap stabilitas keuangan dan keamanan ekonomi Indonesia, terutama terkait potensi mata uang baru BRICS dan peran NDB dalam pendanaan proyek infrastruktur di negara berkembang<sup>11</sup>. Penelitian ini fokus pada dampak kebijakan dan dinamika BRICS terhadap keamanan ekonomi Indonesia, terutama dalam aspek stabilitas nilai tukar rupiah, peran NDB dalam pendanaan proyek infrastruktur, serta dampak geopolitik yang muncul. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru mengenai bagaimana Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi perubahan besar dalam tatanan ekonomi global yang dipelopori BRICS.

Dinamika BRICS menciptakan peluang dan ancaman bagi keamanan ekonomi Indonesia, baik dalam aspek perdagangan, investasi, maupun stabilitas keuangan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana BRICS, dengan berbagai inisiatif dan kebijakan strategisnya, memengaruhi keamanan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal fluktuasi nilai tukar rupiah, ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, serta potensi ketidakseimbangan dalam hubungan perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan BRICS terhadap keamanan ekonomi Indonesia dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan.

## Tinjauan Teoretis

### BRICS

BRICS (Brazil, Russia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang penting di kancah internasional. Awalnya disebut BRIC, akronim ini diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill pada 2001 untuk menggambarkan empat negara dengan pertumbuhan PDB yang signifikan: Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Pada 2011, Afrika Selatan bergabung, memperluas akronim menjadi BRICS dan menambahkan dimensi lintas benua pada

---

<sup>10</sup> Badar Alam Iqbal, "BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development," *Global Journal of Emerging Market Economies* 14, no. 1 (December 21, 2021): 7-8, <https://doi.org/10.1177/09749101211067096>.

<sup>11</sup> Suresh Nanwani, "The New Development Bank: Directions on Strategic Partnerships," *Global Policy* 15, no. 2 (2024): 434-42, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13268>.

kelompok tersebut<sup>12</sup>. Jumlah penduduk negara-negara BRICS sekitar 3,24 miliar orang, mewakili lebih dari 40% populasi dunia. Diperkirakan, pada 2026, populasi BRICS akan bertambah 625 juta orang, terutama di Tiongkok dan India. Proyeksi menunjukkan bahwa pada 2030, BRICS bisa menghasilkan lebih dari 50% PDB global<sup>13</sup>.

BRICS secara teratur mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, energi, keamanan pangan, dan ketahanan terhadap ancaman seperti kejahatan dunia maya dan narkoba. Salah satu capaian utama adalah pendirian *New Development Bank* (NDB) dan *Pool of Conditional Currency Reserves* pada 2015 untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi antaranggota<sup>14</sup>. Secara bertahap, transaksi dalam BRICS kini 65% dilakukan dengan mata uang lokal, sebuah langkah menuju stabilitas finansial global yang lebih inklusif. NDB, sebagai bank pembangunan internasional, turut memainkan peran dalam mendukung negara-negara anggota, misalnya selama pandemi COVID-19 dengan menyediakan dukungan dana senilai 10 miliar dolar<sup>15</sup>.

Selain lima anggota inti, BRICS telah menarik minat negara lain. Tahun 2023, organisasi ini memperluas keanggotaannya dengan mengundang negara-negara seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia. Arab Saudi dan Argentina juga mempertimbangkan keanggotaan, meskipun Argentina akhirnya menarik diri karena alasan keuangan. Diskusi tentang calon anggota baru terus berlanjut, dan BRICS mempertimbangkan konsep keanggotaan bertingkat bagi negara-negara mitra yang berbagi visi serupa, termasuk Turki dan Serbia yang tertarik untuk bergabung.<sup>16</sup>

Semenjak pembentukannya, BRICS memiliki beberapa tujuan utama yang tercantum dalam pernyataan bersama para pemimpin: mendorong reformasi arsitektur keuangan global yang lebih adil, menghindari politik kekuasaan yang mengabaikan kedaulatan negara,

---

<sup>12</sup> Maria L. Lagutina, "BRICS in a World of Regions," *Third World Thematics: A TWQ Journal* 4, no. 6 (2019): 442–58, <https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1643781>.

<sup>13</sup> Iqbal, "BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development."

<sup>14</sup> Hooijmaaijers, "The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank."

<sup>15</sup> Roberto Luiz Silva and Thiago Ferreira Almeida, "The COVID-19 Response of BRICS and Multilateral Development Banks," *BRICS Law Journal* 10, no. 4 (December 6, 2023): 98–120, <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2023-10-4-98-120>.

<sup>16</sup> G. Rached and R. M. Rodrigues de Sá, "BRICS 15 Years On: Challenges and Opportunities for Emerging Countries in the Shifting Global Institutional Landscape," *Vestnik MGIMO-Universiteta* 17, no. 1 (2024): 26–45, <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2024-1-94-26-45>.

dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global<sup>17</sup>. Meskipun beberapa pihak mencoba membandingkan atau bahkan mengadu BRICS dengan NATO, BRICS tidak dirancang sebagai aliansi militer dan tidak memiliki angkatan bersenjata bersama. Sebaliknya, BRICS berfokus pada kerja sama ekonomi dan menjaga dialog politik yang konstruktif antara negara berkembang.<sup>18</sup>

Dinamika politik internal BRICS juga memengaruhi arah dan masa depannya. Misalnya, pergantian kepemimpinan di Brasil dan Afrika Selatan menunjukkan variasi komitmen terhadap BRICS. Brasil, di bawah Presiden Jair Bolsonaro, mengadopsi pendekatan yang lebih pro-Amerika dan mengkritisi pengaruh Tiongkok, meskipun Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Brasil. Di Afrika Selatan, setelah era Presiden Jacob Zuma yang sangat mendukung BRICS, komitmen negara tersebut terhadap proyek BRICS mulai berkurang. Di tengah perbedaan ini, Rusia, Tiongkok, dan India tetap menjadi pilar utama yang memperkuat interaksi lintas kawasan.<sup>19</sup>

Pertemuan BRICS+ dan BRICS *Outreach*, format tambahan yang melibatkan negara-negara non-anggota, merupakan bagian dari upaya BRICS untuk memperluas pengaruh dan menjalin kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki visi serupa. Pada pertemuan tingkat tinggi di Kazan, Rusia pada Oktober 2024, negara-negara anggota BRICS akan bertemu dengan negara-negara mitra dalam format BRICS+ dan *Outreach* untuk membahas isu-isu penting kerja sama regional dan internasional yang saling menguntungkan. Dengan kepemimpinan bergilir yang mengatur agenda dan menyelenggarakan pertemuan, BRICS mengedepankan kesetaraan di antara anggotanya, tanpa struktur hierarkis yang kaku seperti sekretariat atau sekjen.<sup>20</sup>

Sebagai sebuah platform yang tidak memiliki basis institusional formal, BRICS mengandalkan protokol dan keputusan hasil pertemuan tingkat tinggi untuk mengatur langkah-langkah integrasi. Perkembangan

---

<sup>17</sup> Matthias Vom Hau, James Scott, and David Hulme, "Beyond the BRICs: Alternative Strategies of Influence in the Global Politics of Development," *European Journal of Development Research* 24, no. 2 (2012): 187–204, <https://doi.org/10.1057/ejdr.2012.6>.

<sup>18</sup> Mikhail Troitskiy, "BRICS Approaches to Security Multilateralism," *ASPJ Africa & Francophonie*, 2015, 76–88, [http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj\\_f/digital/pdf/articles/2015\\_2/troitskiy\\_e.pdf](http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/digital/pdf/articles/2015_2/troitskiy_e.pdf).

<sup>19</sup> Mihika Chatterjee and Ikuno Naka, "Twenty Years of BRICS: Political and Economic Transformations through the Lens of Land," *Oxford Development Studies* 50, no. 1 (January 2, 2022): 2–13, <https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2033191>.

<sup>20</sup> H. Zhao and D. Lesage, "Explaining BRICS Outreach: Motivations and Institutionalization," *International Organisations Research Journal* 15, no. 2 (2020): 68–91, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2020-02-05>.



BRICS menunjukkan pentingnya struktur kerjasama yang fleksibel namun terkoordinasi dalam mengatasi tantangan global tanpa dominasi satu negara<sup>21</sup>. BRICS tetap berpegang pada prinsip multipolaritas, di mana negara-negara anggotanya mempertahankan kedaulatan dan bekerja sama dengan tidak berorientasi pada konfrontasi.<sup>22</sup>

BRICS juga memiliki peran dalam menciptakan tatanan dunia multipolar yang menentang monopoli “barat” atau negara-negara “miliar emas”. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negara-negara BRICS menolak sistem dunia unipolar yang berbasis pada “aturan” yang tidak jelas dan hanya menguntungkan kepentingan tertentu. Melalui BRICS, negara-negara berkembang berusaha membentuk sistem yang lebih adil, di mana semua negara, besar maupun kecil, memiliki hak dan peran yang sama.<sup>23</sup>

## Dampak Geopolitik terhadap Perekonomian Negara

Dampak geopolitik atau *geopolitical risk* (GPR) merupakan fenomena yang memengaruhi perekonomian global, khususnya di negara-negara berkembang seperti anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Negara-negara BRICS memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian mereka dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik<sup>24</sup>. Ketegangan politik, konflik internasional, serta kebijakan ekonomi yang berubah-ubah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan, pasar obligasi sovereign, konsumsi energi, dan bahkan sektor pariwisata. Penelitian mengenai dampak GPR terhadap ekonomi BRICS semakin penting karena ketidakpastian politik dan kebijakan ekonomi yang muncul akibat ketegangan geopolitik dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Meskipun di sisi lain dapat

---

<sup>21</sup> Francesco Petrone, “BRICS and Civil Society: Challenges and Future Perspectives in a Multipolar World,” *International Organisations Research Journal* 16, no. 4 (December 27, 2021): 171-90, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-04-08>.

<sup>22</sup> Ogbajie Mercy Uzoma et al., “Beyond Economic Growth : BRICS as an Emerging Power and the Search for a Multipolar World Order” 4, no. 5 (2024): 153-57.

<sup>23</sup> Michael A. Peters, “The Emerging Multipolar World Order: A Preliminary Analysis,” *Educational Philosophy and Theory* 55, no. 14 (2023): 1653-63, <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2151896>.

<sup>24</sup> Oluwaseyi Ebenezer Olalere and Janine Mukuddem-Petersen, “Geopolitical Risk, Economic Policy Uncertainty, and Bank Stability in BRICS Countries,” *Cogent Economics and Finance* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2290368>.

mendorong perubahan menuju strategi-strategi yang lebih adaptif, seperti diversifikasi energi dan kebijakan ekonomi yang lebih proaktif.<sup>25</sup>

Salah satu dampak terbesar dari GPR adalah pengaruhnya terhadap stabilitas sektor perbankan di negara-negara BRICS. Penelitian yang melibatkan data 105 bank komersial dari lima negara BRICS antara 2009 hingga 2021 menunjukkan bahwa meningkatnya GPR dan ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU) dapat menurunkan stabilitas sektor perbankan. GPR, seperti ketegangan politik atau konflik internasional, cenderung menciptakan ketidakpastian ekonomi yang meningkatkan volatilitas pasar finansial dan risiko kredit. Dalam kondisi seperti itu, perbankan sering kali menghadapi kesulitan dalam menjaga kestabilan karena investor cenderung menarik dananya dari pasar yang berisiko tinggi. Ketidakpastian ini, pada gilirannya, menyebabkan peningkatan spread kredit dan penurunan rasio pinjaman terhadap simpanan di bank-bank komersial. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan karena perbankan adalah salah satu pilar utama dalam mendukung sektor riil<sup>26</sup>.

Lebih lanjut, interaksi antara GPR dan ketidakpastian kebijakan ekonomi dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua faktor ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas perbankan. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi atau ketegangan geopolitik dapat memengaruhi keputusan investasi dan kebijakan moneter, yang pada akhirnya berdampak pada biaya modal dan likuiditas bank. Oleh karena itu kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidakpastian geopolitik dan kebijakan ekonomi menjadi sangat penting dalam memperkuat sektor perbankan di negara-negara BRICS<sup>27</sup>.

Selain sektor perbankan, GPR juga memengaruhi pasar obligasi *sovereign* yang merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal dan kebijakan moneter suatu negara. Penelitian yang mengkaji hubungan antara GPR dan *sovereign bond yield* di BRICS menunjukkan bahwa ketidakpastian geopolitik dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam imbal hasil obligasi pemerintah, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. GPR, seperti perang atau ketegangan

---

<sup>25</sup> Umer Shahzad et al., "Connectedness between Geopolitical Risk, Financial Instability Indices and Precious Metals Markets: Novel Findings from Russia Ukraine Conflict Perspective," *Resources Policy* 80 (2023): 103190, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103190>.

<sup>26</sup> Olalere and Mukuddem-Petersen, "Geopolitical Risk, Economic Policy Uncertainty, and Bank Stability in BRICS Countries."

<sup>27</sup> Olalere and Mukuddem-Petersen.



politik internasional, memicu lonjakan permintaan terhadap imbal hasil yang lebih tinggi dari investor yang cemas akan meningkatnya risiko<sup>28</sup>.

Di kondisi yang lebih ekstrem, yaitu ketika tingkat suku bunga rendah dan terjadi penurunan aktivitas ekonomi global, ketidakpastian geopolitik justru menyebabkan penurunan imbal hasil obligasi pada jangka pendek dan menengah. Hal ini karena bank sentral cenderung menurunkan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di masa resesi. Di sisi lain, imbal hasil obligasi jangka panjang yang lebih dipengaruhi oleh preferensi investor global, cenderung meningkat saat ada ketegangan geopolitik besar. Investor lebih memilih obligasi pemerintah yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko politik yang lebih besar. Oleh karena itu, GPR berperan penting dalam menentukan keputusan investasi dan strategi perdagangan obligasi, baik dari perspektif domestik maupun global.

Dalam konteks energi, GPR juga berperan dalam menentukan kebijakan konsumsi energi di negara-negara BRICS. Penelitian yang menggunakan data 25 tahun dari negara-negara BRICS ini menunjukkan adanya pengaruh negatif GPR terhadap konsumsi energi fosil (FEC) dan total konsumsi energi (TEC). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya ketidakpastian geopolitik cenderung mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketertarikan terhadap energi terbarukan. Ketegangan geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah atau ketegangan antara negara besar, dapat memengaruhi pasokan energi global dan meningkatkan harga energi, yang pada gilirannya mendorong negara-negara BRICS untuk mencari alternatif energi yang lebih stabil dan ramah lingkungan<sup>29</sup>.

Sebaliknya, penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara GPR dan konsumsi energi terbarukan (REC). Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun ketidakpastian geopolitik dapat mengganggu pasokan energi fosil, negara-negara BRICS mulai beralih ke sumber energi yang lebih terbarukan dan berkelanjutan. Investasi dalam energi terbarukan ini menjadi strategi mitigasi yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi yang rentan terhadap gangguan politik internasional. Negara-negara BRICS, dengan

---

<sup>28</sup> Sowmya Subramaniam, "Geopolitical Uncertainty and Sovereign Bond Yields of BRICS Economies," *Studies in Economics and Finance* 39, no. 2 (January 1, 2022): 311-30, <https://doi.org/10.1108/SEF-05-2021-0214>.

<sup>29</sup> Hua Li et al., "Analysing the Impact of Geopolitical Risk and Economic Policy Uncertainty on the Environmental Sustainability: Evidence from BRICS Countries," *Environmental Science and Pollution Research* 31, no. 34 (2024): 46148-62, <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26553-w>.

dukungan kebijakan yang lebih proaktif terhadap energi terbarukan, dapat memperkuat ketahanan energi mereka dan meminimalkan dampak negatif dari ketegangan geopolitik<sup>30</sup>.

Sektor pariwisata yang merupakan salah satu andalan perekonomian negara-negara BRICS, juga tidak luput dari dampak GPR. Penelitian yang mengkaji hubungan antara GPR dan kedatangan wisatawan menunjukkan bahwa ketidakpastian politik dan ekonomi dapat menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara-negara BRICS. Ketegangan geopolitik, seperti perang atau ancaman terorisme menyebabkan penurunan kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi suatu negara, yang berujung pada penurunan pendapatan dari sektor pariwisata. Dampak ini cenderung lebih terasa dalam jangka pendek, di mana perubahan tiba-tiba dalam keadaan politik dapat memengaruhi keputusan wisatawan secara langsung<sup>31</sup>.

Kebijakan ekonomi yang stabil dan mendukung sektor pariwisata dapat memperkuat daya tarik negara-negara BRICS sebagai destinasi wisata. Pemerintah BRICS perlu memerhatikan dampak dari GPR terhadap sektor ini dengan merumuskan kebijakan yang menjaga stabilitas politik dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi di sektor pariwisata. Dengan mengurangi ketidakpastian dan menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, negara-negara BRICS dapat memitigasi dampak negatif dari GPR dan memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian mereka<sup>32</sup>.

## Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat modern, terutama dalam konteks kebutuhan dasar dan perlindungan di tempat kerja. Konsep ini mencakup jaminan dasar sosial berupa akses terhadap infrastruktur kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, informasi, serta perlindungan sosial, dan keamanan terkait pekerjaan. Keamanan ekonomi memungkinkan masyarakat untuk mengatasi ketidakpastian dan risiko dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan kesempatan yang

---

<sup>30</sup> Li et al.

<sup>31</sup> Geovanny Genaro Reivan-Ortiz et al., "Role of Geopolitical Risk, Currency Fluctuation, and Economic Policy on Tourist Arrivals: Temporal Analysis of BRICS Economies," *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 32 (2023): 78339–52, <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27736-1>.

<sup>32</sup> Reivan-Ortiz et al.

adil untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka melalui pekerjaan yang layak<sup>33</sup>.

Keamanan pendapatan menjadi salah satu fondasi utama dalam keamanan ekonomi. Konsep ini memastikan individu memiliki pendapatan yang mencukupi dan berkelanjutan, baik dari penghasilan langsung maupun dari jaminan sosial, dengan perlindungan terhadap risiko kehilangan penghasilan. Bentuk perlindungan seperti upah minimum, indeksasi upah, jaminan sosial yang komprehensif, dan sistem pajak progresif membantu menjamin stabilitas keuangan individu dan memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan yang lebih baik<sup>34</sup>.

Keamanan representasi melibatkan hak individu dan kolektif untuk memiliki perwakilan yang bisa melindungi hak-hak pekerja dalam negosiasi dan pengambilan keputusan di tempat kerja. Dengan adanya perwakilan yang kuat, pekerja memiliki mekanisme untuk menyalurkan aspirasi mereka dan melindungi kepentingan mereka di lingkungan kerja<sup>35</sup>. Keamanan pasar kerja adalah aspek lain yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Hal ini mencakup tersedianya peluang kerja yang memadai dan beragam untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Melalui kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi<sup>36</sup>.

Di samping itu, keamanan pekerjaan menyediakan perlindungan bagi pekerja dari risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, baik karena pemutusan hubungan kerja yang tidak adil maupun kegagalan usaha bagi pekerja mandiri. Regulasi yang ketat mengenai proses pemutusan hubungan kerja serta perlindungan terhadap karyawan yang dipecah

---

<sup>33</sup> Yaroslav Pushak et al., "Formation the System for Assessing the Economic Security of Enterprise in the Agricultural Sector," *Business: Theory and Practice* 22, no. 1 (2021): 80–90, <https://doi.org/10.3846/btp.2021.13013>.

<sup>34</sup> H. Xavier Jara and Maria Gabriela Palacio Ludeña, "Rethinking Social Assistance amid the COVID-19 Pandemic: Guaranteeing the Right to Income Security in Ecuador," *Journal of International Development* 36, no. 3 (2024): 1738–64, <https://doi.org/10.1002/jid.3878>.

<sup>35</sup> Olena Arefieva et al., "The Economic Security System in the Conditions of the Powers Transformation," *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 7 (2021): 35, <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.4>.

<sup>36</sup> Oleksii Prokopenko et al., "Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development," *International Journal of Computer Science & Network Security* 21, no. 12 (2021): 228–34, <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.34>.

secara tidak adil membantu menjaga stabilitas pekerjaan dan memberi kepercayaan bagi pekerja dalam berkarier<sup>37</sup>. Aspek lain dari keamanan ekonomi adalah keamanan kerja, yang memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini termasuk perlindungan terhadap kecelakaan, penyakit, stres, dan pelecehan di tempat kerja. Dengan adanya lingkungan kerja yang aman, pekerja dapat meningkatkan produktivitas tanpa takut akan risiko kesehatan jangka panjang<sup>38</sup>.

Terakhir, keamanan reproduksi keterampilan memungkinkan pekerja untuk mengakses pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk tetap relevan dalam pasar kerja yang terus berkembang. Hal ini mencakup akses ke pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan, yang penting dalam membangun kapasitas tenaga kerja dan memungkinkan mereka untuk terus berkontribusi secara efektif dalam perekonomian.<sup>39</sup>

## Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Ekonomi Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, tembaga, gas alam, minyak bumi, besi, dan emas<sup>40</sup>. Keberlimpahan sumber daya ini menjadikan Indonesia sebagai mitra penting bagi negara-negara besar, seperti Cina, yang merupakan importir terbesar batu bara Indonesia, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan. Akan tetapi, ketergantungan pada sektor sumber daya alam juga membawa tantangan tersendiri, terutama

---

<sup>37</sup> Fernando Almeida and José Duarte Santos, "The Effects of COVID-19 on Job Security and Unemployment in Portugal," *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9–10 (2020): 995–1003, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0291>.

<sup>38</sup> Aleksandra Webb, Ronald McQuaid, and Sigrid Rand, "Employment in the Informal Economy: Implications of the COVID-19 Pandemic," *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9–10 (2020): 1005–19, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2020-0371>.

<sup>39</sup> Sara R. Farris and Mark Bergfeld, "Low-Skill No More! Essential Workers, Social Reproduction and the Legitimacy-Crisis of the Division of Labour," *Distinktion* 23, no. 2–3 (2022): 342–58, <https://doi.org/10.1080/1600910X.2022.2077400>.

<sup>40</sup> Haeruddin Saleh et al., "The Role of Natural and Human Resources on Economic Growth and Regional Development: With Discussion of Open Innovation Dynamics," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 4 (2020): 1–23, <https://doi.org/10.3390/joitmc6040103>.

dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global yang dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional<sup>41</sup>.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara luas, termasuk peningkatan tingkat pengangguran, penurunan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan daya beli akibat kesulitan mendapatkan pendapatan<sup>42</sup>. Data PDB Indonesia pada kuartal tersebut menunjukkan penurunan dari Rp 3.687,7 triliun pada harga saat ini menjadi Rp 2.589,6 triliun pada harga konstan dengan tahun dasar 2010. Penurunan ini menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap krisis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial<sup>43</sup>.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi memainkan peran krusial sebagai modal untuk memulihkan dan mengembangkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, dapat mempercepat implementasi pertumbuhan ekonomi<sup>44</sup>. Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan pemasaran, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> Mahjus Ekananda, "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility," *Resources Policy* 78 (2022): 102815, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815>.

<sup>42</sup> Susilawati Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1147-56, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.

<sup>43</sup> Marissa Malahayati, Toshihiko Masui, and Lukytawati Anggraeni, "An Assessment of the Short-Term Impact of COVID-19 on Economics and the Environment: A Case Study of Indonesia," *EconomiA* 22, no. 3 (2021): 291-313, <https://doi.org/10.1016/j.econ.2021.12.003>.

<sup>44</sup> Irfan Ridwan Maksum, Amy Yayuk Sri Rahayu, and Dhian Kusumawardhani, "A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 3 (2020): 50, <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>.

<sup>45</sup> Tulus Tambunan, "Micro, Small and Medium Enterprises in Times of Crisis:

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan fokus utama pada pengembangan infrastruktur. Tujuan utama dari pengembangan infrastruktur ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan regional, terutama antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia seperti Papua<sup>46</sup>. Meskipun wilayah timur Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam merealisasikan potensi tersebut. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti Trans Papua Toll Road, Pembangunan PLBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Mandalika International Circuit di Zona Ekonomi Khusus Lombok merupakan langkah strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah<sup>47</sup>.

Aspek hukum ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Reformasi hukum ekonomi, yang mencakup pengembangan legislatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, menjadi kebutuhan mendesak. Prinsip ekonomi rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang demokratis dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada akumulasi modal tetapi juga pada redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial<sup>48</sup>.

Negara kesejahteraan merupakan model pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan melalui peran negara yang lebih aktif dalam penyediaan layanan sosial universal dan komprehensif. Di Indonesia, konsep negara kesejahteraan tercermin dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah

---

Evidence from Indonesia," *Journal of the International Council for Small Business* 2, no. 4 (October 2, 2021): 278-302, <https://doi.org/10.1080/26437015.2021.1934754>.

<sup>46</sup> A. Jatayu et al., "Measuring Levels of Infrastructure Development and Its Impact on Regional Growth - Insights from Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1353, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1353/1/012011>.

<sup>47</sup> Rodhatul Nasikhin, Muhammad Akib, and Agus Triono, "Sustainable Development Goals and Environmentally Sound Infrastructure Development in Indonesia," *Asian Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2022): 7-13, <https://doi.org/10.53402/ajls.v1i1.68>.

<sup>48</sup> Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective" 140, no. 1 (2020): 92-99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.



sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengembangan kesejahteraan sosial ini melibatkan redistribusi sumber daya ekonomi, pengurangan kemiskinan, penyediaan asuransi sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat<sup>49</sup>.

Pentingnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan. Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait ketergantungan pada investasi asing yang dapat mengikis kedaulatan ekonomi nasional<sup>50</sup>. Pembatasan terhadap kepemilikan modal asing dalam sektor perbankan, misalnya, bertujuan untuk mencegah dominasi asing dan memastikan bahwa manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan strategi yang mendorong investasi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional<sup>51</sup>.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang mengandalkan data sekunder yang valid dan telah melalui kajian literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik BRICS dan keamanan ekonomi Indonesia. Pemilihan literatur dilakukan dengan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan keterbaruan informasi, memastikan bahwa data yang digunakan dapat menggambarkan dinamika terkini dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan BRICS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Proses ini melibatkan pencarian, seleksi, dan analisis sumber-sumber yang dianggap paling relevan dan terpercaya untuk mendalami dampak BRICS terhadap ekonomi Indonesia. Literatur yang digunakan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga kebijakan dan

---

<sup>49</sup> Rian Saputra and Silaas Oghenemaro Emovwodo, "Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 1-13, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>.

<sup>50</sup> Ali Sahab et al., "Indonesian Foreign Investment Policy under Oligarchic Economy: Striking Balance between Economic Nationalism and Liberalization," *Journal of the Asia Pacific Economy*, June 25, 2024, 1-19, <https://doi.org/10.1080/13547860.2024.2361575>.

<sup>51</sup> Septiana Sari and Joko Setiyono, "The Development of Green Investment and Its Policies in The Regulation of The Indonesian Government," *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 2 (2022): 118-31, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i2.349>.

geopolitik terkait hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara BRICS. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengorganisasian informasi, identifikasi pola-pola utama, dan penarikan kesimpulan yang menggambarkan implikasi dari dinamika BRICS terhadap ekonomi Indonesia. Keahlian penulis dalam menginterpretasikan teori dan data dari berbagai sumber berperan penting dalam memastikan validitas temuan.

## Hasil Dan Pembahasan

Dalam beberapa dekade terakhir, BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang signifikan di dunia, dengan pengaruh yang semakin besar terhadap ekonomi global. Negara-negara anggota BRICS memiliki peran penting dalam perubahan peta ekonomi dunia, yang dapat memengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan internasional. Oleh karena itu, dinamika ekonomi global, khususnya yang melibatkan BRICS, sangat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

## Dampak Kerja Sama Ekonomi BRICS terhadap Keamanan Ekonomi Indonesia

Kerja sama ekonomi antar negara-negara BRICS semakin memperlihatkan peran penting dalam stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Negara-negara anggota BRICS memiliki potensi ekonomi yang besar dengan populasi yang terus berkembang, sumber daya alam yang melimpah, dan sektor industri yang semakin kuat. Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan posisi ekonomi melalui kerja sama dengan negara-negara BRICS, baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi.

Salah satu dampak positif yang dapat diperoleh Indonesia dari kerja sama ekonomi BRICS adalah peningkatan peluang ekspor<sup>52</sup>. Negara-negara BRICS, terutama China dan India, merupakan pasar yang sangat besar bagi komoditas utama Indonesia, seperti batu bara,

---

<sup>52</sup> Chandrashekar Raghutla and Krishna Reddy Chittedi, "Is There an Export- or Import-Led Growth in Emerging Countries? A Case of BRICS Countries," *Journal of Public Affairs* 20, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.1002/pa.2074>.

minyak kelapa sawit, kopi, karet, dan produk pertanian lainnya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan volume ekspor ke negara-negara BRICS. Akan tetapi, tantangan yang muncul adalah meningkatnya persaingan yang ketat dalam sektor perdagangan. Negara-negara BRICS, terutama China, tidak hanya menjadi pasar bagi komoditas Indonesia, tetapi juga merupakan produsen besar dalam berbagai sektor, seperti manufaktur, elektronik, dan barang-barang konsumen lainnya<sup>53</sup>. Persaingan ini dapat menekan daya saing Indonesia dalam beberapa sektor, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga posisi Indonesia di pasar global.

Kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan negara. Selain perdagangan, Indonesia juga dapat mengakses sumber pembiayaan dari institusi keuangan internasional yang didirikan oleh BRICS, seperti *New Development Bank* (NDB)<sup>54</sup>. Dengan akses pembiayaan ini, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya akan memperbaiki konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola potensi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri karena pengelolaan utang yang tidak hati-hati dapat berisiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh BRICS memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian domestik.

## Dampak Peluncuran Mata Uang Baru BRICS terhadap Nilai Tukar Rupiah

Salah satu aspek yang semakin menarik perhatian dalam dinamika BRICS adalah rencana untuk meluncurkan mata uang baru yang akan digunakan untuk transaksi antar negara-negara anggota BRICS. Mata uang ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang selama ini mendominasi sistem perdagangan internasional. Peluncuran mata uang baru BRICS ini memiliki potensi dampak yang

---

<sup>53</sup> Yuki Fukuoka and Kiki Verico, "Indonesia-China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges BT - Chinese Global Production Networks in ASEAN," ed. Young-Chan Kim (Cham: Springer International Publishing, 2016), 53-75, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-24232-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24232-3_4).

<sup>54</sup> Nanwani, "The New Development Bank: Directions on Strategic Partnerships."

signifikan terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada dolar AS dalam kegiatan perdagangan internasional dan transaksi ekonomi lainnya. Ketergantungan ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara-negara besar, terutama kebijakan suku bunga dan kebijakan fiskal di Amerika Serikat<sup>55</sup>. Dalam konteks ini, peluncuran mata uang baru BRICS dapat menambah ketidakpastian bagi Indonesia dalam hal stabilitas nilai tukar rupiah.

Meskipun demikian, dalam jangka panjang, peluncuran mata uang BRICS dapat menawarkan peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS<sup>56</sup>. Penggunaan mata uang BRICS untuk transaksi internasional antara negara-negara BRICS dan negara-negara mitra dapat membantu Indonesia untuk memperluas diversifikasi cadangan devisa dan mengurangi dampak volatilitas nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan kebijakan AS. Untuk itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan melakukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi transisi sistem keuangan ini, seperti memperkuat sistem moneter domestik dan meningkatkan kapasitas ekonomi untuk menangani perubahan global.

Penggunaan mata uang BRICS juga dapat mengurangi biaya transaksi internasional bagi Indonesia<sup>57</sup>. Dalam transaksi perdagangan internasional, Indonesia seringkali harus melalui konversi mata uang yang melibatkan biaya tambahan dan risiko nilai tukar. Dengan adanya mata uang baru yang digunakan dalam perdagangan dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mengurangi biaya transaksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

---

<sup>55</sup> Siswanto Adil, Muhammad Irfan Fatoni, and Shivam Kakati, "The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar Exchange. Jo," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 6, no. 2 (2024): 1–24.

<sup>56</sup> Aleksia and Bakhtiar, "BRICS as New Alternatives in Reforming International Financial Institutions and Economic Partnerships."

<sup>57</sup> Célestin Coquidé, José Lages, and Dima L. Shepelyansky, "Prospects of BRICS Currency Dominance in International Trade," *Applied Network Science* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00590-3>.

## **Dampak Investasi Infrastruktur yang Didanai oleh *New Development Bank* (NDB)**

Salah satu kontribusi besar yang dapat diberikan oleh BRICS terhadap perekonomian Indonesia adalah investasi dalam pembangunan infrastruktur. *New Development Bank* (NDB), yang didirikan oleh negara-negara BRICS telah berfokus pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat besar dalam hal pembangunan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, seperti Papua dan wilayah Indonesia timur.

Investasi infrastruktur yang didanai oleh NDB berpotensi memperbaiki konektivitas antar daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menurunkan biaya logistik<sup>58</sup>. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan raya, pelabuhan, dan jaringan energi, Indonesia dapat mengakses pasar lebih mudah dan memperkuat daya saing produknya di pasar global. Infrastruktur yang lebih baik juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta membuka peluang baru dalam bidang perdagangan, industri, dan pariwisata.

Di sisi lain, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Meskipun investasi infrastruktur dapat memberikan manfaat jangka panjang, ketergantungan pada pinjaman luar negeri, terutama dari NDB dapat meningkatkan risiko utang luar negeri yang dapat membebani anggaran negara<sup>59</sup>. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang didanai oleh NDB memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian, serta memastikan pengelolaan utang yang transparan dan berkelanjutan.

## **Potensi Kerja Sama Strategis dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global**

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin

---

<sup>58</sup> Christopher Humphrey, "From Drawing Board to Reality Asian Infrastructure Investment Bank and New," 2020.

<sup>59</sup> João Pedro Braga, Bruno De Conti, and Guilherme Magacho, "The New Development Bank (Ndb) as a Mission-Oriented Institution for Just Ecological Transitions : A Case Study Approach to BRICS Sustainable Infrastructure Investment," *Revista Tempo Do Mundo*, no. n. 29 (2022): 139–64, <https://doi.org/10.38116/rtm29art5>.

kompleks, kerja sama strategis dengan negara-negara BRICS dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah ketidakpastian pasar global yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan ekonomi negara besar, dan ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat kemitraannya dengan negara-negara BRICS untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan menghadapi ketidakpastian pasar global.

Negara-negara BRICS, terutama China dan India, memiliki pengalaman dan teknologi yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam sektor energi terbarukan dan pembangunan teknologi <sup>60</sup>. Mengingat tantangan perubahan iklim yang dihadapi oleh dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk bekerja sama dengan negara-negara BRICS dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Kerja sama ini tidak hanya akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga dapat membuka peluang baru dalam sektor teknologi dan pengembangan industri yang ramah lingkungan. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara BRICS dalam sektor teknologi dan inovasi dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia <sup>61</sup>. Negara-negara BRICS, terutama China, telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengembangkan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan *e-commerce*. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan teknologi ini untuk meningkatkan daya saing di sektor teknologi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

## Strategi Indonesia Menghadapi Tantangan Geopolitik dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat yang memengaruhi kestabilan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian ini ditandai dengan fluktuasi harga komoditas, ketegangan

---

<sup>60</sup> Qinghua Fu et al., "Impact of Renewable Energy on Economic Growth and CO2 Emissions – Evidence from Brics Countries," *Processes* 9, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.3390/pr9081281>.

<sup>61</sup> Chi Wei Su et al., "Towards Achieving Sustainable Development: Role of Technology Innovation, Technology Adoption and Co2 Emission for Brics," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.3390/ijerph18010277>.



antara kekuatan besar dunia, serta perubahan kebijakan ekonomi yang sering kali tidak dapat diprediksi. Di tengah dinamika ini, negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) muncul sebagai kelompok ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam merancang kebijakan global. Kerja sama ekonomi dengan BRICS dapat menawarkan peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga membawa tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan strategi yang hati-hati.

### 1. Pentingnya Kerja Sama dengan BRICS di Tengah Ketidakpastian Global

Indonesia sebagai negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas dan investasi asing, menghadapi ketidakpastian yang dihadirkan oleh ketegangan geopolitik serta volatilitas ekonomi global. Sebagai contoh, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di negara-negara maju, serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Ukraina telah menciptakan dampak negatif terhadap perekonomian global yang merembet ke negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, BRICS menawarkan sebuah peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi tradisional, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

BRICS, dengan populasi gabungan yang lebih dari 40% dari total penduduk dunia dan kontribusi lebih dari 25% terhadap PDB global, memiliki kapasitas untuk memberikan stabilitas bagi negara-negara anggotanya di tengah ketidakpastian global. Kerja sama Indonesia dengan BRICS membuka akses terhadap pasar yang lebih besar, serta peluang untuk menarik investasi dan teknologi dari negara-negara anggota, terutama China dan India. Akan tetapi, untuk memaksimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi yang matang dalam mengelola hubungan dengan negara-negara BRICS agar dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.

### 2. Strategi Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Indonesia harus fokus pada diversifikasi ekonomi untuk mengurangi dampak ketergantungan pada negara-negara ekonomi maju dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang, seperti teknologi, energi

terbarukan, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi. Negara-negara BRICS, khususnya China dan India, memiliki kapasitas teknologi dan modal yang dapat digunakan untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Misalnya, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama dengan China dalam pengembangan infrastruktur digital dan energi terbarukan, serta memanfaatkan potensi pasar India yang besar untuk produk-produk manufaktur yang lebih bernilai tambah.

Diversifikasi ekonomi juga melibatkan pengembangan sektor-sektor baru yang tidak bergantung sepenuhnya pada komoditas tradisional seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Indonesia harus berfokus pada inovasi dan pengembangan produk yang dapat bersaing di pasar global. Dalam hal ini, kerja sama dengan negara-negara BRICS bisa membuka jalan untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional yang lebih luas, terutama di negara-negara yang merupakan anggota BRICS. Salah satunya adalah memperluas akses pasar Indonesia untuk produk-produk agribisnis dan manufaktur yang diproduksi dengan teknologi ramah lingkungan, yang sesuai dengan tren konsumsi berkelanjutan di dunia.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global. Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara BRICS. Negara-negara seperti China dan India memiliki sumber daya manusia yang unggul di bidang teknologi, dan Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sangat penting agar Indonesia memiliki SDM yang kompeten dan mampu bersaing dalam ekonomi digital dan industri 4.0.

### 3. Mengelola Ketegangan Geopolitik dan Meningkatkan Diplomasi Ekonomi

Tantangan geopolitik global yang seringkali menimbulkan ketegangan antar negara besar juga memengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China, misalnya, dapat memengaruhi perdagangan internasional dan arus investasi global. Di sisi lain, ketegangan geopolitik di kawasan Eropa Timur, Timur Tengah, dan Laut China Selatan juga memiliki dampak yang tidak kecil terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu memainkan peran diplomatik yang aktif untuk mengurangi dampak dari ketegangan ini.

Indonesia harus memperkuat diplomasi ekonomi dengan negara-negara BRICS yang bisa menjadi buffer terhadap gejolak geopolitik. Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, serta memperkuat hubungan dengan India dan Rusia. Hal ini akan membuka peluang untuk memperoleh investasi, akses pasar, dan kolaborasi teknologi yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat hubungan dengan negara-negara BRICS di luar aspek ekonomi dengan berfokus pada kerja sama politik dan keamanan yang saling menguntungkan.

Dengan menjaga hubungan baik dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan kolektif negara-negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar lain yang mungkin memiliki agenda politik dan ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan Indonesia. Kerja sama yang baik dengan BRICS juga akan meningkatkan posisi Indonesia dalam organisasi internasional, seperti G20, serta memperkuat suara Indonesia dalam pembahasan isu-isu global yang berpengaruh pada keamanan dan stabilitas ekonomi internasional.

#### 4. Meningkatkan Ketahanan Keuangan dan Mengurangi Ketergantungan pada Dolar AS

Salah satu dampak besar dari ketidakpastian ekonomi global adalah fluktuasi nilai tukar mata uang yang sering dipicu oleh perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Ketergantungan Indonesia pada dolar AS dalam perdagangan internasional dan pembiayaan utang luar negeri meningkatkan kerentanannya terhadap gejolak nilai tukar. Dalam hal ini, kerja sama dengan negara-negara BRICS yang sedang mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat ketahanan keuangan dengan mengurangi risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Misalnya, Indonesia bisa bekerja sama dengan BRICS dalam mengembangkan sistem pembayaran alternatif yang mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi perdagangan, baik antar negara anggota BRICS maupun dengan negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga bisa memperkuat cadangan devisanya dengan berinvestasi di mata uang negara-negara BRICS yang dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi kerentanannya terhadap tekanan eksternal.

## Penutup

Dinamika ekonomi BRICS memiliki dampak kompleks terhadap keamanan ekonomi Indonesia. Kerja sama dengan negara-negara BRICS menawarkan peluang signifikan, seperti peningkatan perdagangan, diversifikasi pendapatan, dan akses pembiayaan infrastruktur melalui *New Development Bank* (NDB). Akan tetapi, tantangan seperti persaingan perdagangan, volatilitas nilai tukar rupiah akibat peluncuran mata uang baru BRICS, serta risiko ketergantungan pada pembiayaan asing memerlukan mitigasi yang cermat.

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi strategi yang terarah, seperti memperkuat fundamental ekonomi domestik guna menghadapi volatilitas nilai tukar, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Skala prioritas kebijakan harus mencakup peningkatan kapasitas industri berbasis teknologi dan energi terbarukan, mengingat sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing global sekaligus mendukung keamanan ekonomi nasional. Selain itu, kerangka kerja sama dengan BRICS harus difokuskan pada pembiayaan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada literatur dengan menawarkan analisis empiris tentang implikasi kerja sama internasional terhadap stabilitas ekonomi negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini menyarankan pendekatan kebijakan berbasis risiko untuk memanfaatkan peluang BRICS sembari mengelola dampaknya. Studi lanjutan tentang terkait strategi mitigasi risiko volatilitas nilai tukar akibat peluncuran mata uang baru BRICS, serta potensi kerja sama strategis dalam sektor teknologi dan energi perlu dilakukan untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian lainnya juga diperlukan untuk mengkaji dampak sosial dari investasi infrastruktur yang didanai oleh NDB terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Solusi aplikatif, seperti penguatan kerangka kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi dinamika BRICS dapat menjadi langkah berikutnya dalam memahami dan mengelola dampak hubungan ini secara lebih menyeluruh.

## Daftar Pustaka

- Adil, Siswanto, Muhammad Irfan Fatoni, and Shivam Kakati. "The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar ExcAdil, S., Fatoni, M. I., & Kakati, S. (2024). The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar Exchange. Jo." *Journal of Islamic Economics Perspectives* 6, no. 2 (2024): 1-24.
- Aleksia, Casandra, and Arief Rizky Bakhtiar. "BRICS as New Alternatives in Reforming International Financial Institutions and Economic Partnerships." *Insignia: Journal of International Relations* 10, no. 2 (2023): 128. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2023.10.2.9135>.
- Almeida, Fernando, and José Duarte Santos. "The Effects of COVID-19 on Job Security and Unemployment in Portugal." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9-10 (2020): 995-1003. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0291>.
- Arefieva, Olena, Svitlana Tulchynska, Olha Popelo, Serhii Arefiev, and Tetiana Tkachenko. "The Economic Security System in the Conditions of the Powers Transformation." *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 7 (2021): 35. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.4>.
- Braga, João Pedro, Bruno De Conti, and Guilherme Magacho. "The New Development Bank (Ndb) as a Mission-Oriented Institution for Just Ecological Transitions : A Case Study Approach to BRICS Sustainable Infrastructure Investment." *Revista Tempo Do Mundo*, no. n. 29 (2022): 139-64. <https://doi.org/10.38116/rtm29art5>.
- Chatterjee, Mihika, and Ikuno Naka. "Twenty Years of BRICS: Political and Economic Transformations through the Lens of Land." *Oxford Development Studies* 50, no. 1 (January 2, 2022): 2-13. <https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2033191>.
- Coquidé, Célestin, José Lages, and Dima L. Shepelyansky. "Prospects of BRICS Currency Dominance in International Trade." *Applied Network Science* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00590-3>.
- Ekananda, Mahjus. "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility." *Resources Policy* 78 (2022): 102815. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815>.
- Farris, Sara R., and Mark Bergfeld. "Low-Skill No More! Essential Workers, Social Reproduction and the Legitimacy-Crisis of the Division of

- Labour." *Distinktion* 23, no. 2-3 (2022): 342-58. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2022.2077400>.
- Fu, Qinghua, Susana Álvarez-Otero, Muhammad Safdar Sial, Ubaldo Comite, Pengfei Zheng, Sarminah Samad, and Judit Oláh. "Impact of Renewable Energy on Economic Growth and CO2 Emissions – Evidence from Brics Countries." *Processes* 9, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.3390/pr9081281>.
- Fukuoka, Yuki, and Kiki Verico. "Indonesia-China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges BT - Chinese Global Production Networks in ASEAN." edited by Young-Chan Kim, 53-75. Cham: Springer International Publishing, 2016. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-24232-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24232-3_4).
- Hau, Matthias Vom, James Scott, and David Hulme. "Beyond the BRICs: Alternative Strategies of Influence in the Global Politics of Development." *European Journal of Development Research* 24, no. 2 (2012): 187-204. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2012.6>.
- Hooijmaaijers, Bas. "The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank." *International Political Science Review* 43, no. 4 (July 15, 2021): 481-94. <https://doi.org/10.1177/01925121211024159>.
- Humphrey, Christopher. "From Drawing Board to Reality Asian Infrastructure Investment Bank and New," 2020.
- Iqbal, Badar Alam. "BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development." *Global Journal of Emerging Market Economies* 14, no. 1 (December 21, 2021): 7-8. <https://doi.org/10.1177/09749101211067096>.
- Jara, H. Xavier, and María Gabriela Palacio Ludeña. "Rethinking Social Assistance amid the COVID-19 Pandemic: Guaranteeing the Right to Income Security in Ecuador." *Journal of International Development* 36, no. 3 (2024): 1738-64. <https://doi.org/10.1002/jid.3878>.
- Jatayu, A., S. Zahara, R. A.W.D. Syafitri, S. Dafadhilah, D. R. Roosyanindhita, M. I. Sidiq, and M. S. Priambodo. "Measuring Levels of Infrastructure Development and Its Impact on Regional Growth - Insights from Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1353, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1353/1/012011>.
- Lagutina, Maria L. "BRICS in a World of Regions." *Third World Thematics: A TWQ Journal* 4, no. 6 (2019): 442-58. <https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1643781>.
- Larionova, Marina, and Andrey Shelepov. "BRICS, G20 and Global Economic Governance Reform." *International Political Science*



- Review* 43, no. 4 (August 26, 2021): 512-30. <https://doi.org/10.1177/01925121211035122>.
- Li, Hua, Muhammad Sibte Ali, Bakhtawer Ayub, and Irfan Ullah. "Analysing the Impact of Geopolitical Risk and Economic Policy Uncertainty on the Environmental Sustainability: Evidence from BRICS Countries." *Environmental Science and Pollution Research* 31, no. 34 (2024): 46148-62. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26553-w>.
- Maksum, Irfan Ridwan, Amy Yayuk Sri Rahayu, and Dhian Kusumawardhani. "A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 3 (2020): 50. <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>.
- Malahayati, Marissa, Toshihiko Masui, and Lukyutawati Anggraeni. "An Assessment of the Short-Term Impact of COVID-19 on Economics and the Environment: A Case Study of Indonesia." *Economia* 22, no. 3 (2021): 291-313. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2021.12.003>.
- Naim, Chanif Ainun, and Fitriatul Hasanah. "Deconstructing the Empire: BRICS and the Rise of a Multipolar World." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 13, no. 1 (2024): 80. <https://doi.org/10.25077/ajis.13.1.80-90.2024>.
- Nanwani, Suresh. "The New Development Bank: Directions on Strategic Partnerships." *Global Policy* 15, no. 2 (2024): 434-42. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13268>.
- Nasikhin, Rodhatul, Muhammad Akib, and Agus Triono. "Sustainable Development Goals and Environmentally Sound Infrastructure Development in Indonesia." *Asian Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2022): 7-13. <https://doi.org/10.53402/ajls.v1i1.68>.
- Olalere, Oluwaseyi Ebenezer, and Janine Mukuddem-Petersen. "Geopolitical Risk, Economic Policy Uncertainty, and Bank Stability in BRICS Countries." *Cogent Economics and Finance* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2290368>.
- Peters, Michael A. "The Emerging Multipolar World Order: A Preliminary Analysis." *Educational Philosophy and Theory* 55, no. 14 (2023): 1653-63. <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2151896>.
- Petrone, Francesco. "BRICS and Civil Society: Challenges and Future Perspectives in a Multipolar World." *International Organisations Research Journal* 16, no. 4 (December 27, 2021): 171-90. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-04-08>.
- Prokopenko, Oleksii, Olga Martyn, Olha Bilyk, Olga Vivcharuk, and Mykola Zos-Kior. "Models of State Clusterisation Management,

- Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development." *International Journal of Computer Science & Network Security* 21, no. 12 (2021): 228-34. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.34>.
- Pushak, Yaroslav, Volodymyr Lagodiienko, Nataliya Basiurkina, Valerii Nemchenko, and Nataliia Lagodiienko. "Formation the System for Assessing the Economic Security of Enterprise in the Agricultural Sector." *Business: Theory and Practice* 22, no. 1 (2021): 80-90. <https://doi.org/10.3846/btp.2021.13013>.
- Rached, G., and R. M. Rodrigues de Sá. "BRICS 15 Years On: Challenges and Opportunities for Emerging Countries in the Shifting Global Institutional Landscape." *Vestnik MGIMO-Universiteta* 17, no. 1 (2024): 26-45. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2024-1-94-26-45>.
- Radjendra, Penny, Makarim Wibisono, Joni Mahroza, and Zainal Abidin Shabuddin. "Indonesia's Vision As Global Maritime Fulcrum: A Geopolitical Strategy To Address Geopolitical Shifts In Indo-Pacific." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 5 (2022): 8621-34. <http://journalppw.com>.
- Raghutla, Chandrashekar, and Krishna Reddy Chittedi. "Is There an Export- or Import-Led Growth in Emerging Countries? A Case of BRICS Countries." *Journal of Public Affairs* 20, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1002/pa.2074>.
- Redo, Magdalena, and Marta Gebaska. "Globalization in Growing Financial Markets as a Threat to the Financial Security of the Global Economy." *European Research Studies Journal* XXIII, no. Special Issue 1 (2020): 335-55. <https://doi.org/10.35808/ersj/1764>.
- Reivan-Ortiz, Geovanny Genaro, Phan The Cong, Wing Keung Wong, Anis Ali, Huong Tran Thi Thu, and Shamim Akhter. "Role of Geopolitical Risk, Currency Fluctuation, and Economic Policy on Tourist Arrivals: Temporal Analysis of BRICS Economies." *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 32 (2023): 78339-52. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27736-1>.
- Sahab, Ali, Demas Nauvarian, Naomi Devi Larasati, and Citra Hennida. "Indonesian Foreign Investment Policy under Oligarchic Economy: Striking Balance between Economic Nationalism and Liberalization." *Journal of the Asia Pacific Economy*, June 25, 2024, 1-19. <https://doi.org/10.1080/13547860.2024.2361575>.
- Saleh, Haeruddin, Batara Surya, Despry Nur Annisa Ahmad, and Darmawati Manda. "The Role of Natural and Human Resources on

- Economic Growth and Regional Development: With Discussion of Open Innovation Dynamics." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 4 (2020): 1–23. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040103>.
- Saputra, Rian, and Silaas Oghenemaro Emovwodo. "Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>.
- Sari, Septiana, and Joko Setiyono. "The Development of Green Investment and Its Policies in The Regulation of The Indonesian Government." *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 2 (2022): 118–31. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i2.349>.
- Shahzad, Umer, Kamel Si Mohammed, Sunil Tiwari, Joanna Nakonieczny, and Renata Nesterowicz. "Connectedness between Geopolitical Risk, Financial Instability Indices and Precious Metals Markets: Novel Findings from Russia Ukraine Conflict Perspective." *Resources Policy* 80 (2023): 103190. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103190>.
- Shynkar, Svitlana, Zoriana Gontar, Mariya Dubyna, Daria Nasypaiko, and Mariya Fleychuk. "Assessment of Economic Security of Enterprises: Theoretical and Methodological Aspects." *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 261–71. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11573>.
- Silva, Roberto Luiz, and Thiago Ferreira Almeida. "The COVID-19 Response of BRICS and Multilateral Development Banks." *BRICS Law Journal* 10, no. 4 (December 6, 2023): 98–120. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2023-10-4-98-120>.
- Streltsov, Evgeny Sergeevich, Aleksandr Aleksandrovich Rozhin, Sh. S. Vosiev, and Sergey Nikolaevich Kosnikov. "The Economic Potential of the Brics Countries as a Challenge to Modern World Realities." *Propósitos y Representaciones* 9, no. SPE3 (2021). <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe3.1143>.
- Su, Chi Wei, Yannong Xie, Sadaf Shahab, Ch Muhammad Nadeem Faisal, Muhammad Hafeez, and Ghulam Muhammad Qamri. "Towards Achieving Sustainable Development: Role of Technology Innovation, Technology Adoption and Co2 Emission for Brics." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph18010277>.
- Subramaniam, Sowmya. "Geopolitical Uncertainty and Sovereign Bond Yields of BRICS Economies." *Studies in Economics and Finance* 39, no.

- 2 (January 1, 2022): 311–30. <https://doi.org/10.1108/SEF-05-2021-0214>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective" 140, no. Icleh (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Susilawati, Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko. "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1147–56. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.
- Tambunan, Tulus. "Micro, Small and Medium Enterprises in Times of Crisis: Evidence from Indonesia." *Journal of the International Council for Small Business* 2, no. 4 (October 2, 2021): 278–302. <https://doi.org/10.1080/26437015.2021.1934754>.
- Troitskiy, Mikhail. "BRICS Approaches to Security Multilateralism." *ASPJ Africa & Francophonie*, 2015, 76–88. [http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj\\_f/digital/pdf/articles/2015\\_2/troitskiy\\_e.pdf](http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/digital/pdf/articles/2015_2/troitskiy_e.pdf).
- Uzoma, Ogbajie Mercy, Ogbajie Delight Chibuzor, Rosemary Eberechi Obi, Bello Kehinde Oluwafemi, Chukwujama Ginika Mary-cynthia, Chinyere Blessing Offorah, Odubiyi Michael Adams, et al. "Beyond Economic Growth : BRICS as an Emerging Power and the Search for a Multipolar World Order" 4, no. 5 (2024): 153–57.
- Waisbich, Laura Trajber, and Caio Borges. "The BRICS' New Development Bank at the Crossroads: Challenges for Building Development Cooperation in the Twenty-First Century." In *Governing China in the 21st Century*, 149–87, 2020. [https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2\\_7](https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2_7).
- Webb, Aleksandra, Ronald McQuaid, and Sigrid Rand. "Employment in the Informal Economy: Implications of the COVID-19 Pandemic." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9–10 (2020): 1005–19. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2020-0371>.
- Zhao, H., and D. Lesage. "Explaining BRICS Outreach: Motivations and Institutionalization." *International Organisations Research Journal* 15, no. 2 (2020): 68–91. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2020-02-05>.